

## PERKEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI INDONESIA

Oleh Bambang B. Soedjito

Sejak Repelita I, pembangunan industri mempunyai peranan penting dalam transformasi struktur perekonomian Indonesia. Hal ini paling tidak terbukti dari kepesatan pertumbuhan sektor tersebut serta peningkatan sumbangannya terhadap produk domestik bruto (PDB).

Selama Repelita I hingga Repelita III pertumbuhan sektor manufaktur rata-rata mencapai 12,6 persen per tahun, sementara ekonomi nasional bertumbuh sebesar 7,1 persen. Dalam kurun 1969-1983, sumbangan sektor manufaktur terhadap PDB mengalami peningkatan dari 9,2 persen (pada 1969) menjadi 13,2 persen (pada 1983). Sementara itu, dalam periode yang sama, sumbangan sektor pertanian terhadap PDB mengalami penurunan dari 49,3 persen (1969) menjadi 26,1 persen (1983).

Perubahan struktur ekonomi tersebut, juga ditunjukkan oleh pergeseran daya serap tenaga kerja kedua sektor. Penyerapan tenaga kerja oleh sektor manufaktur mengalami peningkatan dari 7,5 persen (1971) menjadi 10,4 persen (1982). Untuk kurun waktu yang sama, penyerapan tenaga kerja oleh sektor pertanian mengalami penurunan dari 67,3 persen (1971) menjadi 54,7 persen (1982). Agar lebih jelas lihat Tabel 1.

**Tabel 1**  
**PERGESERAN SUMBANGAN**  
**SEKTOR PERTANIAN DAN MANUFAKTUR**  
**TERHADAP PDB INDONESIA**  
(dalam persen)

|            | 1971  | 1976  | 1980  | 1982  |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Pertanian  | 67,32 | 61,65 | 56,37 | 54,66 |
| Manufaktur | 7,48  | 8,39  | 9,18  | 10,42 |

Sumber :

1. BPS : Sensus 1971 dan 1980
2. BPS : Survey Tenaga Kerja 1976
3. BPS : Survey Sosial Ekonomi Nasional 1982

Mulai Repelita III dan Repelita IV, khususnya setelah masa resesi ekonomi dunia dan anjloknya harga minyak pada 1983, sektor manufaktur mendapat perhatian lebih besar lagi. Dalam Repelita V, sektor tersebut bahkan lebih dipacu lagi pertumbuhannya guna menyongsong era lepas landas.

Kecenderungan itu terlihat dari peningkatan nilai ekspornya. Pada 1978 nilai ekspor sektor manufaktur sebesar 1.605 juta dolar AS, meningkat menjadi 4.165 juta dolar AS pada 1985. Dalam periode itu, sumbangan sektor manufaktur terhadap nilai ekspor total (dihitung dengan minyak dan gas bumi) meningkat dari 13,8 persen menjadi 22,4 persen, sedangkan terhadap nilai ekspor tanpa minyak dan gas bumi meningkat dari 43,9 persen menjadi 91 persen.

Perkembangan sektor manufaktur dalam beberapa Repelita terasa cukup mengesankan. Namun beberapa isu mendasar timbul seiring dengan perkembangannya, menyangkut struktur industri maupun aspek pengelolaan ruang kegiatannya. Di samping itu, timbul pula masalah persebaran lokasi industri yang tidak merata.

Kenyataan menunjukkan, kegiatan industri manufaktur terutama yang berskala besar dan sedang terpusat di Pulau Jawa. Hal ini terukur dari segi penyerapan tenaga kerja maupun nilai tambahnya (lihat Tabel 2). Pada 1985 sekitar 78 persen industri manufaktur berskala besar dan sedang berlokasi di Pulau Jawa, dan sekitar 30 persen di antaranya berlokasi di wilayah Jabotabek.

Perkembangan yang tidak merata itu tak terlepas dari kondisi Jawa yang lebih menguntungkan, terutama menyangkut kelengkapan prasarana fisik dan sosial, ketersediaan tenaga kerja, sentralisasi sistem pemerintahan serta potensi pasar yang besar.

Pengembangan sektor industri manufaktur pada masa mendatang selain lebih diarahkan untuk memproduksi barang ekspor, peningkatan daya serap terhadap tenaga kerja, memproses hasil pertanian, memproduksi permesinan, juga lokasinya diarahkan agar tersebar merata.

**Tabel 2**  
**PERSEBARAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN**  
**NILAI TAMBAH SEKTOR MANUFAKTUR**  
**BERSKALA SEDANG DAN BESAR**  
**PADA 1975, 1980 DAN 1985**

| Pulau         | % Tenaga Kerja |       |       | % Nilai Tambah |       |       |
|---------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|               | 1975           | 1980  | 1985  | 1975           | 1980  | 1985  |
| Sumatera      | 6,3            | 8,3   | 12,1  | 9,0            | 9,4   | 13,4  |
| Jawa          | 89,1           | 86,1  | 78,6  | 87,4           | 84,8  | 77,9  |
| Kalimantan    | 1,8            | 3,5   | 5,6   | 1,8            | 4,5   | 6,7   |
| Sulawesi      | 1,1            | 1,0   | 1,7   | 1,3            | 0,9   | 1,2   |
| Pulau Lainnya | 1,8            | 1,0   | 1,9   | 0,5            | 0,4   | 0,8   |
| Jumlah        | 100,0          | 100,0 | 100,0 | 100,0          | 100,0 | 100,0 |

Sumber: (Lase, 1988:28)

### Perspektif Sejarah Pengembangan Kawasan Industri di Indonesia

Perkembangan sektor industri yang pesat selama dua Repelita pertama berdampak pada tingginya permintaan terhadap lahan, terutama di Jawa. Kebutuhan terhadap lahan industri yang siap bangun tidak hanya menjadi isu kuat pada tahun 1980-an, melainkan sudah dirasakan sebagai persoalan sejak tahun 1960-an dan 1970-an.

Guna menanggapi permintaan tersebut, pihak pemerintah telah merintis pengembangan kawasan industri. Selain bertujuan menyediakan lahan siap bangun, pengembangan kawasan industri juga dimaksudkan untuk mengarahkan lokasi industri agar lebih tersebar merata. Sejauh ini, industri umumnya berlokasi di sepanjang jalan raya dan kerap menggunakan lahan pertanian yang subur. Hal ini terjadi akibat pengaturan penggunaan lahan yang ada masih lemah, sehingga pengelolaan penggunaan lahan yang berlandaskan pada rencana induk menjadi tidak efektif.

Kawasan industri yang dikembangkan pemerintah telah dirintis sejak 20 tahun lalu. Konsep pengembangan kawasan industri di Jakarta, Surabaya dan Cilacap (semuanya di Jawa) telah dikembangkan pemerintah pada akhir 1960-an. Kawasan Industri Rungkut Surabaya (KIRS) disepakati pembangunannya pada 1968, sedangkan Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta (KIPJ) pada 1969 dan Kawasan Industri Cilacap (KIC) pada 1971.

Studi kelayakan untuk memilih lokasi serta pematangan lahan dilakukan pada 1971 untuk KIPJ dengan bantuan Amerika Serikat, pada 1972 untuk KIRS dengan bantuan Jerman Barat dan pada 1974 untuk KIC

dengan bantuan Australia. Agar dapat menggunakan bantuan dana dari pihak asing (loans), maka status Perseroan Terbatas (PT) diberikan untuk KIPJ pada 1973, KIRS pada 1974 dan KIC baru pada 1988. Kavling mulai dipasarkan pada 1973 untuk KIPJ, 1975 untuk KIRS dan KIC mulai dipasarkan pada 1976.

Beberapa tahun kemudian dilakukan pengembangan kawasan industri di luar Jawa, yaitu di Medan (Sumatera Utara) pada 1972 dan Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) pada 1974. Studi kelayakan untuk Kawasan Industri Medan (KIM) dilakukan pada 1974 dengan bantuan ahli dari Selandia Baru dan pada 1975 untuk Kawasan Industri Ujung Pandang (KIUP) dengan bantuan ahli ekonomi dan ahli teknik dari Jepang. Pembangunannya sendiri baru dimulai beberapa tahun kemudian, yaitu 1978 mulai dibangun KIM dan KIUP baru mulai dibangun pada 1982. Dengan sendirinya, penjualan kavling pun baru dapat dilakukan pada 1983 (untuk KIM) dan 1986 (untuk KIUP). Kedua proyek tersebut mendapatkan status PT-nya baru pada 1988.

Menyusul kemudian dibangun pula kawasan industri di Bandar Lampung (Lampung) dan Cirebon (Jawa Barat). Kawasan industri Bandar Lampung telah memulai pembangunan fisik kawasan pada 1986, sedang Kawasan Industri Cirebon masih dalam tahap perencanaan. Studi kelayakan untuk kedua kawasan industri tersebut dilakukan oleh konsultan Indonesia.

Lokasi kawasan industri di Indonesia terlihat pada peta halaman berikut ini.

### Aspek Kelembagaan dan Legalitas

Pembangunan industri ditangani secara lintas sektoral di bawah koordinasi Bappenas. Selain Departemen Perindustrian yang menangani secara langsung, juga terkait departemen lain, terutama Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, serta badan negara seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Departemen Perindustrian memiliki empat direktorat jenderal (Ditjen), yakni Ditjen Industri Mesin dan Logam Dasar, Ditjen Aneka Industri, Ditjen Industri Kimia Dasar dan Ditjen Industri Kecil. Selain itu,

## LOKASI KAWASAN INDUSTRI DI INDONESIA



### LEGENDA:

- A. KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG JAKARTA
- B. KAWASAN INDUSTRI RUMPUT SURABAYA
- C. KAWASAN INDUSTRI CILACAP
- D. KAWASAN INDUSTRI MEDAN
- E. KAWASAN INDUSTRI UJUNG PANDANG
- F. KAWASAN INDUSTRI BANDAR LAMPUNG
- G. KAWASAN INDUSTRI CIREBON



Departemen Perindustrian juga memiliki Inspektorat Jenderal (Irjen) dan Sekretariat Jenderal (Setjen).

Koordinasi dan kerja sama antara berbagai lembaga departemen maupun non departemen tersebut secara teori memang mudah dilakukan, seperti tertuang dalam berbagai keputusan Presiden maupun keputusan menteri. Namun dalam pelaksanaannya tidaklah sederhana, berbagai kendala menyulitkan koordinasi dan kerja sama berjalan dengan baik.

Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan industri yang lokasinya tersebar di berbagai daerah, Departemen Perindustrian bekerja bersama dengan Departemen Dalam Negeri.

Untuk memperoleh persetujuan dan perizinan misalnya, dibutuhkan waktu sampai beberapa tahun. Kelambatan ini bukan hanya diakibatkan birokrasi yang berlaku pada suatu instansi, tetapi juga timbul akibat koordinasi yang melibatkan sejumlah instansi berbeda. Pada gilirannya, masalah ini kurang mendukung penciptaan iklim yang merangsang perkembangan kawasan industri.

Sementara itu, dalam kaitan dengan aspek legalitas, terdapat beberapa isu utama, antara lain:

1. Belum ada peraturan dan perundangan khusus yang mengatur pembangunan dan pengoperasian kawasan industri;
2. Partisipasi swasta dalam pengembangan kawasan industri belum nampak;
3. Kapasitas dan kualitas pengelolaan kawasan industri yang telah ada belum mampu menjalankannya perusahaan sesuai tuntutan bisnis seperti halnya usaha swasta;
4. Prosedur perolehan persetujuan dan perizinan masih perlu disederhanakan, sehingga memudahkan pengurusan yang pada gilirannya merangsang pemilik modal untuk menanamkannya di suatu daerah.

### Evaluasi Umum

Untuk memperoleh gambaran tentang potensi perkembangan kawasan industri, tim Bank Pembangunan Asia (BPA) menerapkan tujuh kriteria, yaitu:

1. Pasar untuk barang-barang manufaktur;
2. Ketersediaan sumber daya;
3. Kelayakan infrastruktur;
4. Harapan penanam modal;
5. Peranan instansi pemerintah;
6. Penanganan masalah lingkungan;
7. Prasarana sosial.

Hasil evaluasi tim BPA berdasarkan kriteria penilaian tersebut, terlihat pada Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3**  
**Potensi Perkembangan**  
**Kawasan Industri di Indonesia**

|                | Potensi<br>Perkembangan<br>Manufaktur | Permintaan Lahan<br>Industri | Sediaan Lahan<br>Industri |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Jabotabek      | sangat baik                           | sangat baik                  | sangat baik               |
| Surabaya       | baik                                  | sangat baik                  | sangat baik               |
| Medan          | baik                                  | baik                         | sangat baik               |
| Ujung Pandang  | sedang                                | baik                         | baik                      |
| Bandar Lampung | buruk                                 | terbatas                     | baik                      |
| Cilacap        | sangat buruk                          | sangat terbatas              | baik                      |
| Cirebon        | sangat buruk                          | sangat terbatas              | baik                      |

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka jelas hanya kawasan industri di Jakarta, Surabaya dan Medan yang dapat diharapkan berkembang pesat. Sementara kawasan industri di Cilacap dan Ujung Pandang tampaknya sulit berkembang. Untuk kawasan industri yang belum operasional, yaitu yang berlokasi di Cirebon dan Bandar Lampung, masih bergantung pada kebijaksanaan pemerintah untuk mengembangkannya lebih lanjut.

### Bahan Bacaan

Asian Development Bank, **Industrial Estate Promotion Study Indonesia: Draft Final Report**, Indulexco dan FGU-Kronberg, Jakarta, April 1989

Biro Pusat Statistik, **Analisa Perbandingan Industri Besar/Sedang, Kecil dan Rumah Tangga**, Jakarta, 1987

Bredo, William, **Industrial Estates Tool for Industrialization**, New York: The Free Press, 1960

Biro Pusat Statistik, **Provincial Income in Indonesia: 1979-1988**, Jakarta, 1988

Biro Pusat Statistik, **Statistical Yearbook of Indonesia: 1987**, Jakarta 1988

Hartarto, Pola **Pengembangan Industri Nasional**, Sambutan pada Simposium Teknik Kimia 1985, Bandung, 5 November 1985

Harsono, Soni, **Land Title Policy on Industrial Estates Development**, Makalah disajikan pada Simposium Promosi Kawasan Industri di Indonesia, Jakarta, 13-15 Juni 1989

Hasibuan, Nurimansjah, **Analisa Statistik Industri Besar dan Sedang**, Jakarta, BPS, 1987

Lase, Yusuf Sozawato, **Persebaran Lokasi Industri Besar dan Sedang Antarpropinsi di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Parsial**, Tugas Akhir ITB, Bandung, 1988

LPP-ITB, **Studi Kelayakan Industri Padang**, Bandung, Februari 1986

Departemen Perindustrian dan Pusat Penelitian Perencanaan Pembangunan Nasional Universitas Gajah Mada, **Studi Nasional Kawasan Industri**, Jakarta, Oktober 1984

Departemen Perindustrian dan Asian Development Bank, **Dokumentasi Hasil Lokakarya dan Simposium Industrial Estate Promotion, Indonesia**, Jakarta 13-15 Juni 1989

Sektiaji, Budi, **Identifikasi Kebutuhan Kualifikasi Tenaga Kerja Sektor Industri Besar dan Sedang Antarpropinsi di Indonesia**, Tugas Akhir ITB, Bandung, 1988

Susilo, Kasru, **Industrial Estates**, Makalah disajikan pada Seminar "Spatial Dimension of Industrial Development with Environmental Outlook, Surabaya, Ikatan Alumni Universitas Gajah Mada, 17-18 Februari 1988